

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.1.1. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi. Pada prinsipnya pembedaan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap.

Di Indonesia definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-perorangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut. Sedangkan usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka karakteristik dari masing-masing usaha adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha dengan jumlah kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun.
- b. Usaha kecil adalah usaha dengan jumlah kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan penjualan sekurangnya 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah selama satu tahun.
- c. Usaha menengah adalah usaha dengan jumlah kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan sekurangnya 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun.

2.1.2. Perkembangan UMKM

Perkembangan usaha tidak hanya meliputi kenaikan pendapatan, tetapi juga dengan bertambahnya volume, laba, maupun tenaga kerja. Maka dapat dikatakan bahwa perkembangan usaha menunjukkan perubahan dalam usaha tersebut, perubahan ini berupa usahanya sudah mengalami kemajuan atau semakin tinggi pertumbuhan daya saing ekonomi. Dengan adanya peningkatan daya saing ini akan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak sehingga mampu bertahan bahkan bersaing dengan perusahaan lain.

Berkembangnya suatu usaha dilihat dari segi pendapatan (omset) yang diterima setiap bulannya, pertumbuhan penjualan, bertambahnya karyawan, peningkatan laba, dan peningkatan nilai asset dan juga diimbangi dengan adanya kemajuan kinerja perusahaan tersebut. Apabila semua ini sudah terwujud, maka usaha tersebut dapat dianggap mengalami perkembangan.

Begitu juga dengan perkembangan UMKM, Perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah dapat diukur dengan melihat bertambahnya tingkat pendapatan yang diterima. Apabila mengalami kenaikan, maka dapat disebut mengalami pertumbuhan atau perkembangan. Jika mengalami penurunan pendapatan, maka dapat diartikan UMKM tersebut mengalami kemerosotan.

2.1.3. Permasalahan UMKM

Eka Wahyuliana (2018) Mendefinisikan permasalahan UMKM menjadi dua permasalahan utama, yaitu masalah financial dan masalah non-financial (organisasi manajemen).

Masalah yang termasuk dalam masalah finansial diantaranya adalah:

- a. Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan baik disebabkan oleh ketiadaan bank di pelosok maupun tidak tersedianya informasi yang memadai.
- b. Bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi.
- c. Biaya transaksi yang tinggi, yang disebabkan oleh prosedur kredit yang cukup rumit sehingga menyita banyak waktu sementara jumlah kredit yang dikucurkan kecil

Sedangkan yang termasuk dalam masalah non-financial (organisasi manajemen) diantaranya adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan atas teknologi produksi dan quality control yang disebabkan oleh minimnya kesempatan untuk mengikuti perkembangan teknologi serta kurangnya pendidikan dan pelatihan.
- b. Kemampuan pemasaran yang terbatas. Meskipun media online telah berkembang, akan tetapi media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM.
- c. Belum memiliki pengetahuan mendasar membangun sebuah usaha, dan kesempatan belajar yang minim untuk mendalami sistem akuntansi untuk mengelola keuangan.
- d. Belum berjaln kemitraan yang baik yang saling menguntungkan antar pelaku UMKM, usaha besar, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- e. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha. Sering kali dijumpai UMKM hanya *one man show*, sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendirinya.
- f. Kesulitan dalam memperhitungkan omset, laba kotor sampai dengan lababersih karena pembukuan yang masih manual seringkali menghambat UMKM

untuk bisa *growth* dan *scale up* bisnisnya. Walaupun pembukuan untuk bisnis merupakan hal yang sepele, nyatanya dengan data pembukuanlah suatu perusahaan bisa mengukur keberhasilan dan merencanakan strategi perusahaan ke depannya.

2.2. Standar Akuntansi keuangan (SAK) EMKM

2.2.1. Latar belakang SAK EMKM

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) EMKM yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2018 untuk membantu UMKM Indonesia agar menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

SAK EMKM dirancang secara khusus sebagai patokan standar akuntansi keuangan pada UMKM. Standar Keuangan ini disusun dan disahkan oleh IAI atau Ikatan Akuntansi Indonesia sebagai sebuah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. SAK EMKM ini merupakan salah satu dorongan kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan UMKM yang lebih maju. Hal ini sangat dibutuhkan untuk usaha terutama UMKM untuk mengembangkan usahanya, karena laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam sebuah usaha. Gunanya agar setiap pengeluaran dan pemasukkan jelas dan seimbang.

2.2.2. Ruang Lingkup SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Mikro, Kecil dan Menengah dimaksudkan untuk digunakan:

1. Entitas mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seridaknya selama dua tahun berturut-turut.
2. Entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria dalam paragraph 1, jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan.

2.2.3. Tujuan dan Manfaat SAK EMKM

Tujuan diterbitkan SAK EMKM agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip going concern yakni menginginkan usahanya terus berkembang. Untuk mengembangkan usaha perlu banyak upaya yang harus dilakukan. Salah satu upaya itu adalah perlunya meyakinkan publik bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi wujud pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai kemudahan, misalnya: untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang dapat memperoleh pinjaman dana dari pihak ketiga, dan sebagainya.

2.2.4. Laporan Keuangan sesuai SAK EMKM

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) EMKM menyebutkan laporan keuangan minimum terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan. Laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Piutang
- c. Persediaan
- d. Aset tetap
- e. Utang usaha
- f. Utang bank
- g. Ekuitas

Tabel 2.1. Format Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS			
Laporan Posisi Keuangan			
31 Desember 20xx dan 20xx			
ASET	CATATAN	20xx	20xx
kas dan setara kas			
Kas	3	XXX	XXX
Giro	4	XXX	XXX
Deposito	5	XXX	XXX
Jumlah kas dan setara kas		XXX	XXX
Piutang usaha	6	XXX	XXX
Persediaan		XXX	XXX
Beban dibayar dimuka	7	XXX	XXX
Aset Tetap		XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan		(XXX)	(XXX)
JUMLAH ASET		XXX	XXX
LIABILITAS			
Utang usaha		XXX	XXX
Utang bank	8	XXX	XXX
JUMLAH LIABILITAS		XXX	XXX
EKUITAS			
Modal		XXX	XXX
Saldo laba	9	XXX	XXX
JUMLAH EKUITAS		XXX	XXX
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		XXX	XXX

Sumber: SAK EMKM, 2016

2. Laporan Laba Rugi

SAK EMKM mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi yang meruakan kinerja keuangan entitas untuk suatu periode. Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi entitas dapat mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan
- b. Beban keuangan
- c. Beban pajak

Tabel 2.2. Format Laporan Laba Rugi

ENTITAS				
Laporan Laba Rugi				
Untuk Tahun-taun Yang Berakhir				
31 Desember 20xx dan 20xx				
PENDAPATAN	CATATAN	20xx	20xx	
Pendapatan usaha	10	XXX	XXX	
Pendapatan lain-lain		XXX	XXX	
JUMLAH PENDAPATAN		XXX	XXX	
BEBAN				
Beban usaha		XXX	XXX	
Beban lain-lain	11	XXX	XXX	
JUMLAH BEBAN		XXX	XXX	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		XXX	XXX	
Beban Pajak Penghasilan	12	<u>XXX</u>	<u>XXX</u>	
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN		XXX	XXX	

Sumber: SAK EMKM, 2016

3. Catatan atas Laporan Keuangan

Informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan yaitu:

- a. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM
- b. Ikhtisar kebijakan akuntansi
- c. Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

Tabel 2.3. Format Catatan atas Laporan Keuangan

ENTITAS Catatan Atas Laporan Keuangan 31 Desember 20xx dan 20xx
<p>1. UMUM Entitas didirikan pada 1 Januari 20xx berlokasi di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. xx 20xx tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur dan termasuk kriteria mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008.</p> <p>2. IKHTIAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING</p> <p>a. Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan disusun menggunakan Standart Akuntansi Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>b. Dasar Penyusunan Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.</p> <p>c. Piutang usaha Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.</p> <p>d. Persediaan</p>

Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Overhead tetap dialokasikan ke biaya konversi berdasarkan kapasitas produksi normal. Overhead variabel dialokasikan pada unit produksi berdasarkan penggunaan akrual fasilitas produksi. Entitas menggunakan rumus biaya persediaan rata-rata.

e. Aset tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan penjualan diakui tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.

g. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. KAS

	<u>20xx</u>	<u>20xx</u>
Kas kecil jakarta - Rupiah	xxx	xxx

4. GIRO

	<u>20xx</u>	<u>20xx</u>
PT. Bank xxx - Rupiah	xxx	xxx

5. DEPOSITO

	<u>20xx</u>	<u>20xx</u>
PT. Bank xxx - Rupiah	xxx	xxx
Suku Bunga Deposito: Rupiah	<u>20xx</u> 4,50%	<u>20xx</u> 5,00%

6. PIUTANG USAHA

	<u>20xx</u>	<u>20xx</u>
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	<u>20xx</u>	<u>20xx</u>
Sewa	xxx	xxx
Asuransi	xxx	xxx
Lisensi dan perizinan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

8. UTANG BANK

Pada tanggal 4 Maret 20xx, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) berasal dari PT. Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20xx. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.

9. SALDO LABA

Saldo laba merupakan akuntansi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.

10. PENDAPATAN PENJUALAN

	<u>20xx</u>	<u>20xx</u>
Penjualan	xxx	xxx
Retur penjualan	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Jumlah	xxx	xxx

11. BEBAN LAIN-LAIN

	<u>20xx</u>	<u>20xx</u>
Bunga penjualan	xxx	xxx
Lain-lain	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Jumlah	xxx	xxx

12. BEBAN PAJAK PENGHASILAN

	<u>20xx</u>	<u>20xx</u>
Pajak Penghasilan	xxx	xxx

Sumber: SAK EMKM, 2016